

## Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur

Juliansyah<sup>1</sup>, Khoffifah<sup>2\*</sup>, Khoiriyah<sup>3</sup>, Daryono<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Email: Khooffifah@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini membahas pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai strategi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas SDM dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, termasuk laporan pemerintah dan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan nasional untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur.

**Kata Kunci:** Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan

### Abstract

*This research discusses human resource development (HRD) as a key strategy in poverty alleviation efforts in East Kalimantan. Using a descriptive qualitative approach, this study analyses various factors that influence the quality of human resources and their relationship with the poverty rate in the region. The data used comes from secondary sources, including government reports and statistical data. The results show that improving the quality of education, access to health, and economic empowerment of local communities are key to reducing poverty. This research provides policy recommendations for local and national governments to focus on improving the quality of human capital as a strategic step in poverty alleviation in East Kalimantan.*

**Keywords:** Human Resources, Poverty, Education, Health

### Pendahuluan

Kalimantan Timur terletak di bagian timur Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Malaysia di utara. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 129.066,64 km<sup>2</sup> dan terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, termasuk batu bara, minyak bumi, gas alam, serta hutan tropis yang luas. Secara sosial-ekonomi, Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama di sektor pertambangan dan

<b>How to cite:</b>	Juliansyah, Khoffifah, Khoiriyah, Daryono (2024) Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur, (5) 7
<b>E-ISSN:</b>	2722-5356
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

perkebunan. Namun, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, distribusi kesejahteraan belum merata, dengan masih adanya kantong-kantong kemiskinan di beberapa daerah (Ginting, 2016); (Hidayat, 2017). Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,87 persen, dari Rp 768.120 per orang per bulan pada September 2022 menjadi Rp 790.186 per orang per bulan pada Maret 2023

Kemiskinan adalah masalah utama yang selalu menjadi fokus utama dalam banyak program pemerintah Indonesia. Perspektif tentang kemiskinan terus berubah, tetapi intinya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Ningrum, Khairunnisa, & Huda, 2020);(Dewi, Yusuf, & Iyan, 2017);(Salsabila & Azhar, 2023). Kemiskinan mencerminkan kondisi kekurangan yang terjadi bukan karena keinginan orang miskin tersebut (Tamboto & Manongko, 2019);(Mirananda, 2020);(Prasetya, 2020).

Menurut Yustitia (2022), seseorang dianggap miskin jika ia sering mengalami kelaparan dan kesehatan yang buruk, memiliki sedikit atau tidak punya kemampuan melek huruf sama sekali, berada dalam kondisi miskin, kurang terwakili dalam politik, dan berupaya memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja pada sektor kecil pertanian marginal atau kumuh.

Kemiskinan alamiah dan ekonomi dapat disebabkan oleh kondisi alam, ekonomi, struktural, sosial, dan budaya. Kekurangan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lainnya menyebabkan rendahnya peluang produksi yang menghambat kontribusi pada pembangunan (Surono, 2017);(Asikin & Fadilah, 2024). Ketidakmerataan hasil pembangunan, kelembagaan, dan kebijakan pembangunan menyebabkan kemiskinan struktural dan sosial (Mirananda, 2020). Sementara itu, kemiskinan kultural, juga dikenal sebagai "budaya," dikarenakan oleh kebiasaan hidup yang membuat seseorang merasa cukup dengan keadaan mereka, sehingga tetap berada dalam kemiskinan (Yulianingrum, Absori, & Hasmiati, 2021).

Faktor-faktor penyebab kemiskinan bisa berasal dari dalam maupun luar komunitas yang miskin. Faktor internal meliputi rendahnya kualitas SDM serta keterbatasan sumber daya alam, kebijakan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja dan persaingan (Zhafira, Husen, Mandairaira, Yusnaldi, & Ertika, 2022);(Suwanto, 2020);(Sinambela, 2018).

Jenis kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan durasinya. Ada empat jenis kemiskinan: 1). Kemiskinan berkelanjutan, yaitu kemiskinan yang berlangsung lama atau turun-temurun di wilayah yang terisolasi atau bergantung pada sumber daya alam yang kritis. 2). Kemiskinan siklus, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. 3). Kemiskinan musiman, yang biasanya dialami oleh nelayan dan petani tanaman pangan. 4). Kemiskinan akibat kecelakaan, yang terjadi akibat bencana alam atau kebijakan tertentu..

Selain itu, kemiskinan dapat dibedakan dengan membandingkannya terhadap ukuran tertentu atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan garis kemiskinan atau indikator lain yang menunjukkan tingkat

kemiskinan. Selain itu, tingkat kemiskinan juga dapat dinilai secara relatif dengan membandingkannya terhadap jumlah keseluruhan kelompok tersebut. Pengukuran ini dapat menggunakan Kurva Lorentz dan rasio Gini untuk mengevaluasi seberapa besar disparitas yang ada.

Model pembangunan yang menjadi dasar program pengentasan kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi jenis-jenis program yang diterapkan oleh pemerintah, serta untuk menentukan fokus strategis yang diterapkan dalam implementasi program tersebut (Anggraini, Indraddin, & Azwar, 2022). Untuk menghadapi tantangan terbesar saat ini, seperti kesenjangan dalam kesempatan, penting untuk memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjangkau. Pemerintah pusat perlu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan kondisi makroekonomi, serta mengimplementasikan kebijakan fiskal yang mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya bupati dan kepala desa, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa akses bagi warga miskin dapat terpenuhi.

Menurut Triharyanti (2023), dari sudut pandang ekonomi, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan mencakup ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya manusia dan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya manusia. Keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya dapat mempengaruhi kualitas produk di daerah yang sering kali mengalami kekurangan sumber daya manusia dan alam dibandingkan dengan daerah yang lebih berlimpah.

Sumber daya manusia yang kurang berkualitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan rendah, nasib yang tidak menguntungkan, diskriminasi, atau faktor-faktor keturunan. Kurangnya produktivitas akibat hal ini berdampak pada penghasilan yang rendah, yang artinya pendapatan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu elemen kunci dalam proses produksi adalah modal; memiliki akses yang memadai terhadap modal dapat meningkatkan tingkat produktivitas. Namun, kekurangan akses terhadap modal dapat menyebabkan penurunan produktivitas, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pendapatan. Dampaknya adalah pengurangan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendalami pemahaman tentang upaya pengembangan sumber daya manusia dalam konteks penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam dan deskriptif mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi sumber daya manusia di Kalimantan Timur, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelatihan kerja. Analisis deskriptif akan menguraikan secara rinci karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut, serta implikasi dari upaya-upaya tersebut terhadap pengentasan kemiskinan secara keseluruhan.

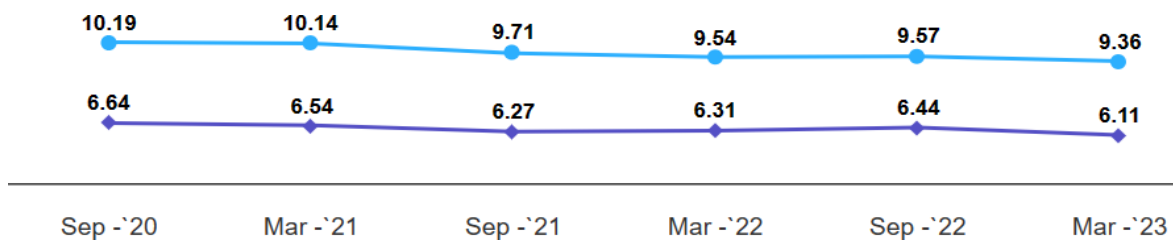
### Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, dan geografis, berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia. Bencana alam, pandemi, rendahnya investasi, dan pengangguran adalah beberapa faktor yang sering memperburuk situasi ini. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga memperdalam jurang antara yang kaya dan yang miskin, membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih kompleks dan menantang.

**Tabel 1. Membandingkan Tingkat Kemiskinan di Nasional dan Provinsi**

Wilayah	September - 2020	March - 2021	September - 2021	March - 2022	September - 2022	March - 2023
Nasional	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19
Provinsi Kalimantan Timur	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64

Sumber Data : Badan Pusat Statistik



**Grafik 1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional dengan Provinsi**

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Walaupun sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia mengadopsi 14 indikator untuk mengukur kemiskinan, beberapa daerah memodifikasi indikator tersebut dengan memasukkan tambahan indikator yang sesuai dengan konteks lokal mereka. Penggunaan pendapatan, pengeluaran, dan kondisi tempat tinggal sebagai ukuran utama membuat berbagai indikator ini cenderung berfokus pada aspek ekonomi. Namun, kemiskinan juga meliputi dimensi-dimensi sosial, psikologis, budaya, dan politis. Karena itu, menjelaskan dan mengukur kemiskinan dari perspektif yang beragam ini tidak dapat dilakukan hanya dengan satu variabel, yaitu aspek ekonomi. Hal ini menyebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan seringkali tidak mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal.

Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial di Indonesia, Kementerian Sosial memutuskan untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi konsep dan indikator kemiskinan yang komprehensif, mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, budaya, dan politik. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi pemerintah untuk meningkatkan kebijakan terkait penetapan sasaran dan implementasi program penanggulangan kemiskinan.

### Tingkat Kemiskinan

Di Indonesia, garis kemiskinan ditetapkan oleh BPS berdasarkan survei ekonomi dan sosial. Tingkat kemiskinan ini mencerminkan seberapa banyak penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan digunakan sebagai indikator penting dalam mengukur kesejahteraan sosial serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menggunakan data ini untuk merancang kebijakan dan program yang bertujuan mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. *Head Count Index (HCI-P0)* adalah persentase masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.

**Tabel 2. Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota (Rp/kapita/bulan)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	477.440	515.414	527.659	556.371	600.332
Kutai Barat	542.393	583.532	598.037	635.478	679.660
Kutai Kartanegara	503.968	548.423	569.640	605.321	644.570
Kutai Timur	569.449	610.858	626.492	659.136	714.241
Berau	526.615	568.500	595.550	624.948	677.819
Penajam PaserUtara	466.918	499.807	513.666	538.022	583.239
Mahakam Ulu	588.756	631.517	644.910	684.644	740.683
Balikpapan	572.108	613.622	657.521	680.499	743.084
Samarinda	658.307	719.710	750.055	784.198	850.842
Bontang	582.188	636.491	665.572	697.326	763.661
Kalimantan Timur	609.155	662.302	689.035	728.208	790.186

**Sumber Data :** Badan Pusat Statistik

### Jumlah Penduduk Miskin

Pemerintah telah menetapkan target untuk mengurangi jumlah penduduk miskin setiap tahunnya hingga mencapai angka terendah. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menjalankan berbagai program dan kebijakan. Beberapa program bertujuan untuk mengurangi pengeluaran melalui perlindungan sosial, sementara kebijakan lainnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui inisiatif seperti dana desa dan program kredit usaha rakyat.

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur cukup signifikan karena adanya banyak perusahaan besar di provinsi tersebut yang seharusnya dapat memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Jumlah penduduk miskin di tiap kabupaten/kota dapat dilihat berdasarkan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota(Ribu Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	25,45	26,77	27,56	27,02	26,39
Kutai Barat	13,45	13,78	15,38	15,38	14,69
Kutai Kartanegara	56,34	58,42	62,36	62,87	60,86
Kutai Timur	35,31	36,98	37,78	36,84	37,04

Berau		11,62	12,30	13,62	13,31	13,26
Penajam Utara	Paser	11,52	11,93	12,13	11,59	11,19
Mahakam Ulu		3,19	3,26	3,18	3,10	3,06
Balikpapan		15,78	17,02	18,53	15,83	14,99
Samarinda		39,80	41,92	42,84	41,95	41,89
Bontang		7,46	7,91	8,41	8,39	7,71
Kalimantan Timur		219,92	230,27	241,77	236,25	231,08

Sumber data : BPS, 2024

Persentase total populasi yang hidup dalam kemiskinan di wilayah Kalimantan Timur dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten/Kota(Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	8.95	9.23	9.73	9.43	9.11
Kutai Barat	9.09	9.29	10.24	10.20	9.72
Kutai Kartanegara	7.20	7.31	7.99	7.96	7.61
Kutai Timur	9.48	9.55	9.81	9.28	9.06
Berau	5.04	5.19	5.88	5.65	5.54
Penajam Paser Utara	7.18	7.36	7.61	7.25	6.97
Mahakam Ulu	11.25	11.44	11.90	11.55	11.38
Balikpapan	2.42	2.57	2.89	2.45	2.31
Samarinda	4.59	4.76	4.99	4.85	4.81
Bontang	4.22	4.38	4.62	4.54	4.11
Kalimantan Timur	5.94	6.10	6.54	6.31	6.11

Sumber data: Badan Pusat Statistik

### Indeks Kesenjangan/Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran yang menggambarkan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Secara praktis, indeks ini berguna untuk memperkirakan besaran transfer yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan jika dilakukan dengan tepat sasaran tanpa kebocoran atau hambatan. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil, yang berarti efektivitas program pengentasan kemiskinan semakin meningkat.

Indeks Kesenjangan Kemiskinan juga memiliki peran penting dalam perencanaan kebijakan pemerintah. Dengan memahami seberapa jauh penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, pemerintah dapat merancang program bantuan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Misalnya, program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dapat disesuaikan berdasarkan data indeks ini. Selain itu, indeks ini juga membantu dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan kesenjangan kemiskinan yang lebih tinggi, sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan lebih strategis. Dengan demikian, penurunan nilai Indeks Kesenjangan Kemiskinan merupakan indikator positif yang

menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan sedang berjalan dengan baik dan mendekati sasaran yang diharapkan.

**Tabel 5. Indeks Kedalaman/Kesenjangan Kemiskinan Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	1.570	1.040	1.370	1.350	1.040
Kutai Barat	1.480	1.230	1.070	1.560	1.290
Kutai Kartanegara	0.950	0.910	1.220	1.180	0.910
Kutai Timur	1.900	2.020	1.640	2.330	1.200
Berau	0.660	0.700	0.950	0.980	0.160
Penajam Paser Utara	1.000	0.870	1.180	1.070	0.750
Mahakam Ulu	1.940	1.460	1.770	2.080	1.020
Balikpapan	0.260	0.380	0.500	0.170	0.250
Samarinda	0.570	0.720	1.070	0.590	0.750
Bontang	0.420	0.540	0.470	0.370	0.390
Kalimantan Timur	0.910	1.020	1.220	0.990	0.770

**Sumber Data:** Badan Pusat Statistik

### **Keparahan Kemiskinan**

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mendalam tentang distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini mengukur seberapa parah tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan seberapa jauh dan seberapa tidak meratanya pengeluaran penduduk miskin di bawah garis kemiskinan. Tingginya indeks ini menunjukkan kondisi kemiskinan yang parah. Informasi dari indeks ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin tetapi juga mengurangi ketimpangan di antara mereka, sehingga program bantuan sosial dapat ditargetkan secara lebih efektif untuk mencapai penduduk yang paling membutuhkan. Dengan demikian, penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan menandakan perbaikan dalam distribusi kesejahteraan di antara penduduk miskin dan merupakan indikator keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang lebih adil dan merata.

Mengatasi keparahan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menerapkan program-program yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong peningkatan keterampilan dan akses terhadap peluang ekonomi. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi. Selain itu, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas juga memainkan peran penting dalam mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Upaya pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha dan pendampingan bagi usaha kecil dan menengah, dapat membantu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat miskin. Dengan sinergi antara berbagai program ini, diharapkan keparahan kemiskinan dapat berkurang secara signifikan, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

**Table 6. Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	0.400	0.210	0.320	0.290	0.190
Kutai Barat	0.410	0.280	0.210	0.420	0.230
Kutai Kartanegara	0.190	0.160	0.370	0.260	0.170
Kutai Timur	0.550	0.630	0.440	0.780	0.280
Berau	0.120	0.170	0.200	0.220	0.010
Penajam Paser Utara	0.280	0.170	0.300	0.250	0.140
Mahakam Ulu	0.550	0.290	0.370	0.580	0.140
Balikpapan	0.060	0.120	0.150	0.020	0.040
Samarinda	0.110	0.210	0.320	0.130	0.160
Bontang	0.080	0.090	0.080	0.050	0.050
Kalimantan Timur	0.210	0.240	0.340	0.230	0.140

Sumber data: Badan Pusat Statistik

### Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase orang yang sedang mengikuti pendidikan, tanpa memandang tingkat pendidikan mereka, terhadap total populasi. Terdapat empat kategori umum yang mencakup indikator APS: (I) APS 7-12 tahun, (II) APS 13-15 tahun, (III) APS 16-18 tahun, dan (IV) APS 19-23 tahun. Kelompok umur ini mencakup individu yang sedang mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar, menengah, dan tinggi.



Gambar 2. Angka Partisipasi Sekolah APS, 2019-2022

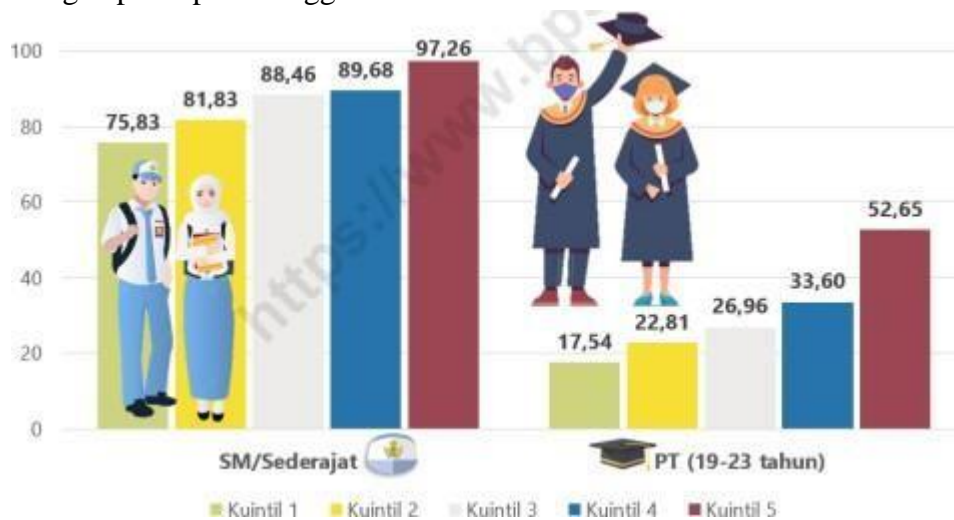
Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2022

Dilihat dari rentang usia, tingkat partisipasi sekolah menurun seiring bertambahnya usia (7-12 tahun dan 13-15 tahun) telah mencapai lebih dari 95 persen. Namun, tingkat APS pada kelompok usia 16-18 tahun masih sekitar 73 persen, meskipun terjadi peningkatan perlahan setiap tahunnya. Di sisi lain, tingkat APS pada kelompok usia 19-23 tahun adalah 27,61 persen, yang berarti sekitar satu dari empat penduduk dalam kelompok usia ini sedang bersekolah. Kelompok usia 19-23 tahun sejalan dengan kelompok usia untuk jenjang pendidikan tinggi, meskipun indikator APS tidak



membedakan antara kelas dan jenjang pendidikan, sehingga tidak mencerminkan partisipasi sekolah pada jenjang perguruan tinggi.

Akses ke pendidikan tinggi menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan melarikan diri dari kemiskinan, meskipun akses tersebut masih sulit bagi orang miskin, terutama pada tingkat perguruan tinggi. Seperti yang terlihat, pada tahun 2023, hanya 17,54 persen dari rumah tangga dengan pengeluaran terendah (Kuintil 1) yang mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk perguruan tinggi. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga yang berada di kelompok pengeluaran tertinggi (Kuintil 5), di mana lebih dari separuh dari penduduk usia 19-23 tahun sedang menempuh pendidikan tinggi (52,65 persen). Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan disparitas dalam akses ke pendidikan tinggi antara rumah tangga dengan pendapatan tinggi dan rendah.



**Gambar 2.** Angka Partisipasi Kasar SM/ sederajat dan PT menurut Kelompok Pengeluaran, 2023

**Sumber:** Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Masih sulitnya akses pendidikan tinggi bagi penduduk miskin sejalan dengan temuan dari penelitian Ridho Al Izzati (2021), yang menunjukkan bahwa anak-anak dari rumah tangga dalam 60 persen terbawah dalam hal kemiskinan hanya memiliki peluang antara 1 persen hingga 20 persen untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Angka peluang ini relatif rendah dibandingkan dengan anak-anak dari rumah tangga kaya yang memiliki peluang antara 20%-60% melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan dalam akses pendidikan tinggi berdasarkan status ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial di kalangan masyarakat kurang mampu.

Akses pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat miskin di banyak negara, termasuk di Indonesia. Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama menjadi beban bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Selain itu, kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama di daerah pedalaman atau terpencil, membuat anak-anak sulit untuk mengakses sekolah dengan baik. Masalah ini semakin diperparah dengan ketersediaan guru yang terbatas dan kualifikasi yang bervariasi di

berbagai daerah. Selain aspek fisik dan ekonomi, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam menentukan akses pendidikan, seperti adanya norma-norma yang menghambat partisipasi anak perempuan dalam pendidikan atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam keluarga miskin.

Tingginya tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur sebagian besar disebabkan oleh adanya banyak perusahaan besar di provinsi tersebut yang seharusnya dapat menyerap tenaga kerja lokal. Namun, ketidakmampuan untuk memanfaatkan peluang ini memperburuk kondisi ekonomi lokal. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota dapat dilihat dalam data dari BPS yang menunjukkan distribusi dan konsentrasi kemiskinan di seluruh wilayah provinsi:

**Tabel 7. Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	25,45	26,77	27,56	27,02	26,39
Kutai Barat	13,45	13,78	15,38	15,38	14,69
Kutai Kartanegara	56,34	58,42	62,36	62,87	60,86
Kutai Timur	35,31	36,98	37,78	36,84	37,04
Berau	11,62	12,30	13,62	13,31	13,26
Penajam Paser Utara	11,52	11,93	12,13	11,59	11,19
Mahakam Ulu	3,19	3,26	3,18	3,10	3,06
Balikpapan	15,78	17,02	18,53	15,83	14,99
Samarinda	39,80	41,92	42,84	41,95	41,89
Bontang	7,46	7,91	8,41	8,39	7,71
Kalimantan Timur	219,92	230,27	241,77	236,25	231,08

Sumber data : BPS, 2024

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan meliputi kejadian bencana alam yang sering terjadi, seperti pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020-2021, penurunan investasi baru, kehilangan lapangan kerja di banyak sektor bisnis, dan dampak kebijakan pemerintah. Contohnya, kenaikan harga bahan bakar yang diikuti oleh peningkatan harga barang dan jasa lainnya merupakan salah satu dampak yang signifikan. Selain itu, keterpencilan geografis suatu daerah dapat berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dari semua faktor yang disebutkan, aspek sumber daya manusia adalah yang paling krusial. Hubungan langsung terlihat antara kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan bisa diatasi lebih cepat jika terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Sebaliknya jika kualitas SDM rendah, akan memerlukan waktu lama untuk mengangkat orang dari kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui pendidikan yang terfokus. Namun, ini memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara spesifik, pendidikan adalah kunci utama dalam pengembangan SDM. Meskipun demikian, investasi dalam pendidikan adalah proses panjang dan tidak memberikan hasil yang instan, serta memerlukan biaya yang signifikan serta waktu yang cukup lama.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas, yang dapat dengan mudah terserap oleh pasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi Indonesia memiliki hubungan yang erat, sehingga meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kemungkinan akan berkontribusi pada peningkatan kemakmuran.

**Aspek Pendidikan**

Untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan suatu negara, sering kali digunakan indikator populasi. Pendidikan yang berkualitas memiliki dampak signifikan terhadap kualitas dan kapabilitas individu dalam berbagai aspek kehidupan.

**Tabel 8. Persentasi Penduduk usia 7-24 tahun Kalimantan Timur**

Jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut jenis kelamin, kelompok umur sekolah, dan partisipasi sekolah (persen) Tidak sekolah lagi		
	2020	2021	2022
Laki-Laki	-	-	-
7-12	0.03	0.07	0.03
13-15	1.34	0.77	1.34
16-18	19.17	16.28	19.96
19-24	69.98	70.59	71.50
7-24	27.32	26.09	26.56
Perempuan	-	-	-
7-12	0.26	0.00	0.00
13-15	0.43	0.26	1.07
16-18	16.66	19.66	16.22
19-24	70.38	69.60	68.99
7-24	25.10	25.66	24.69

Sumber data : BPS, 2024

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program di bidang pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu program utama adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah tanpa terkendala biaya. Program ini memberikan bantuan finansial langsung kepada siswa untuk keperluan pendidikan mereka, seperti pembelian buku, seragam, dan biaya sekolah lainnya. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program beasiswa untuk siswa berprestasi, memperluas akses ke pendidikan tinggi melalui berbagai skema bantuan, dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pelatihan bagi guru serta memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Program-program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

**Kesimpulan**

Sejumlah program pemerintah Indonesia selalu menempatkan masalah kemiskinan sebagai prioritas utama. Banyak faktor yang menjadi latar belakang dan penyebab kemiskinan, seperti bencana alam, investasi yang rendah, pengurangan tenaga kerja, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar dan barang kebutuhan

pokok, serta keterpencilan geografis. Kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kemiskinan. Keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan akan lebih mudah dicapai jika sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama jika kualitasnya rendah. Pendidikan yang terfokus merupakan kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan akses pendidikan, dan menyediakan jaminan kesehatan.

### BIBLIOGRAFI

- Anggraini, Retno, Indraddin, Indraddin, & Azwar, Azwar. (2022). Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan: Studi di Nagari Sungai Pinang. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(2), 130–145.
- Asikin, Muhamad Zaenal, & Fadilah, Muhamad Opan. (2024). Masa Depan Kewirausahaan dan Inovasi: Tantangan dan Dinamika dalam Era Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 303–310.
- Dewi, Novita, Yusuf, Yusbar, & Iyan, Rita Yani. (2017). *Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*. Riau University.
- Ginting, Ari Mulianta. (2016). Pengaruh ketimpangan pembangunan antarwilayah terhadap kemiskinan di Indonesia 2004-2013. *Kajian*, 20(1), 45–58.
- Hidayat, Wahyu. (2017). *Perencanaan pembangunan Daerah: Pendekatan pertumbuhan ekonomi, Disparitas pendapatan dan kemiskinan*. UMMPress.
- Mirananda, Cut. (2020). *Kekayaan Sumber Daya Alam Dan Fenomena Kemiskinan Di Kalangan Masyarakat Pesisir (Studi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)*. UIN AR-RANIRY.
- Ningrum, Jahtu Widya, Khairunnisa, Aziza Hanifa, & Huda, Nurul. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212–222.
- Prasetya, Nintan. (2020). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri. *RISK: Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 1(2), 55–71.
- Salsabila, Fadil, & Azhar, Zul. (2023). Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. *ARZUSIN*, 3(4), 465–480.
- Sinambela, L. P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surono, Agus. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 459–478.
- Suwanto, Suwanto. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Bmt El-Raushan Tangerang. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 3(2), 156–165.
- Tamboto, Henry J. D., & Manongko, Allen A. Ch. (2019). *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial*. Makaria Waya.
- Triharyanti, Nana, Hergianasari, Putri, & Nau, Novriest Umbu Walangara. (2023). Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-

- CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022. *Administraus*, 7(3), 1–19.
- Yulianingrum, Aullia Vivi, Absori, Absori, & Hasmiati, Rahmatullah Ayu. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 1–24.
- Yustitia, Erika, Thoriq, Arief Mulyawan, & Ardiansyah, Hamdan. (2022). Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purwakarta Periode 2011–2020. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 6(1), 43–52. <https://doi.org/10.32627>
- Zhafira, Nabila Hilmy, Husen, Tamitha Intassar, Mandaraira, Fitria, Yusnaidi, Yusnaidi, & Ertika, Yenny. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sebagai Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry*, 2(2), 30–36.

---

**Copyright holder:**

Juliansyah, Khoffifah, Khoiriyah, Daryono (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

